



**Surat Kabar Sebagai Salah Satu Media Penyampaian Informasi
Politik pada Partisipasi Politik Masyarakat**

***Newspapers as One of the Media Submission of Political Information
on Political Participation Society***

Agung Suharyanto*

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

*Corresponding author: E-mail: agungsuaharyanto@staff.uma.ac.id

Abstrak

Meskipun pada dasarnya membuat seseorang untuk berpartisipasi itu tidaklah mudah, ada saja masyarakat yang enggan untuk berpartisipasi, padahal keikutsertaan masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah berdampak bagi masyarakat itu sendiri, apabila masyarakat menentukan kebijakan yang positif, yang didukung oleh pelaksanaan dan pengawasan yang baik, maka yang dihasilkan pun akan menjadi baik. Namun apabila masyarakat atau warga Negara memilih seorang pemimpin yang salah dalam artian pemimpin yang tidak jujur, maka yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri, jadi, pilihan itu sebenarnya ada ditangan masyarakat kita sendiri, jika memilih yang baik, maka hasilnya pun akan baik mengingat Indonesia adalah Negara Demokrasi yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, surat kabar sebagai media penyampaian informasi politik memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat

Kata Kunci: Pengaruh, Surat Kabar; Media; Informasi Politik; Partisipasi Politik

Abstract

Although basically getting someone to participate is not easy, there are people who are reluctant to participate, whereas community participation in influencing government policy affects the community itself, if people determine positive policies, supported by good execution and supervision, the result will be good. But if society or citizens choose a wrong leader in the sense of dishonest leader, then the one who is harmed is the society itself, so, the choice is actually in the hands of our own society, if choosing good, then the result will be good considering Indonesia is The Democratic State is the government of the people, by the people, and for the people. Thus, it can be concluded that, the newspaper as a medium of information delivery of politics gives a significant influence on the political participation of the community

Keywords: Influence, Newspaper; Media; Political Information; Political Participation

How to Cite: Suharyanto, A., (2016), Surat Kabar Sebagai Salah Satu Media Penyampaian Informasi Politik pada Partisipasi Politik Masyarakat, Jurnal Administrasi Publik, 6 (2): 123-136.

PENDAHULUAN

Negara demokrasi adalah negara yang mengikutsertakan partisipasi rakyat dalam pemerintahan menjamin terpenuhinya hak dasar rakyat dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara. Demokrasi dalam bidang politik, menekankan pentingnya partisipasi warga Negara dalam kehidupan politik, mengingat demokrasi menempatkan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Salah satu hak dasar rakyat yang harus dijamin adalah kemerdekaan menyampaikan pikiran, baik secara lisan maupun tulisan, sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pers memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi. Pers adalah salah satu sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat serta memiliki peranan penting dalam negara demokrasi. Pers yang bebas dan bertanggung jawab memegang peranan penting dalam masyarakat demokratis dan merupakan salah satu unsur bagi negara dan pemerintahan yang demokratis.

Ada empat kriteria demokrasi, antara lain: 1) kebebasan mengeluarkan pendapat, 2) kebebasan persuratkabaran, 3) kebebasan berkumpul dan 4) kebebasan beragama.

Menurut UU NO 40 TAHUN 1999 merupakan landasan bagi pelaksanaan pers di Indonesia, Pasal 1 menyatakan bahwa:

“pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data-data grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan saluran yang tersedia”.

Pers juga melaksanakan kontrol sosial yang sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun

penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya pers menghormati hak asasi setiap orang, Karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.

Ada 2 pengertian tentang pers, yaitu sebagai berikut: 1) Dalam arti sempit; Pers adalah media cetak yang mencakup surat kabar, majalah, tabloid, dan buletin-buletin pada kantor berita. 2) Dalam arti luas; Pers mencakup semua media komunikasi, yaitu media cetak, media audio visual, dan media elektronik. Contohnya radio, televisi, film, internet, dan sebagainya.

Surat kabar termasuk pengertian pers dalam arti sempit. Pers atau media amat dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemerintah mengharapkan dukungan dan ketaatan masyarakat untuk menjalankan program dan kebijakan negara. Sedangkan masyarakat juga ingin mengetahui program dan kebijakan pemerintah yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 3 disebutkan mengenai fungsi pers, dalam hal ini pers nasional. Adapun fungsi pers nasional adalah sebagai berikut: 1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. 2) Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.”

Menurut Jonriah, 2008, Fungsi dan kedudukan pers dalam http://flp-usacanada.org/index.php?option=com_content&view=article&id=54:fungsi-dan-kedudukan-pers&catid=56:jurnalistik&Itemid=59, menyatakan bahwa: Secara umum, ada 4 (empat) fungsi yang dimainkan oleh pers, yaitu fungsi informasi, fungsi hiburan, fungsi pendidikan, dan fungsi kontrol sosial.

Fungsi Informasi adalah fungsi pers yang paling standar. Munculnya jurnalistik adalah karena adanya informasi yang hendak

disampaikan oleh pihak tertentu kepada khalayak masyarakat.

Fungsi Hiburan juga cukup penting, karena manusia membutuhkan hiburan di sela-sela kehidupannya yang serba serius.

Fungsi Pendidikan dari pers tak kalah penting, karena pada dasarnya manusia membutuhkan berbagai tuntunan dan pelajaran dalam hidupnya. Pers diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi pengembangan kepribadian manusia.

Fungsi Kontrol Sosial merupakan fungsi yang paling banyak disinggung dalam setiap perbincangan mengenai pers. Hal ini disebabkan kehidupan manusia tak pernah mencapai kondisi ideal seperti yang dicita-citakan setiap agama maupun ideologi. Hidup kita dikelilingi oleh ketidakadilan, penyimpangan nilai-nilai moral, kejahatan yang makin brutal, penindasan, dan sebagainya. Di sinilah pers ikut menjalankan peran untuk saling mengingatkan sesama manusia.

Jadi jelaslah, pers memiliki kedudukan yang sangat penting dalam perjalanan suatu bangsa. Pers merupakan pilar keempat demokrasi diilhami oleh pikiran cerdas *John Locke* yang melihat bahwa pemerintahan tidak hanya digerakkan oleh ketiga pilar hasil pikiran *Montesque* yakni: legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi pemerintah juga harus mendengarkan keinginan yang berkembang dalam masyarakat. Penempatan Pers sebagai pilar keempat karena pers memiliki peran untuk membentuk pendapat umum, sekaligus sebagai ruang publik (*Publik Sphere*) yang menyediakan tempat kepada anggota masyarakat untuk berimprovisasi dalam penyampaian pikiran dan pendapat. Pers juga memiliki kebebasan untuk mengkritisi Legislatif, eksekutif, dan yudikatif, apakah ketiga pilar itu telah berjalan sesuai dengan mekanisme pemerintahan yang benar. Namun, satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan meta-kritik terhadap dirinya, apakah juga pers telah melaksanakan fungsi-fungsinya sesuai tuntutan profesionalisme.

Karena itu, pers memiliki pengaruh yang amat besar terhadap masyarakat. Banyak budaya masyarakat yang berubah karena pers, baik perubahan yang positif maupun negatif.

Besarnya pengaruh pers ini disadari sepenuhnya oleh banyak pihak. Pemerintah, dengan kekuasaannya, mencoba mengendalikan pers agar pilar keempat ini tidak sampai menyebarkan opini yang dapat merusak citra pemerintah di mata rakyat, dan agar rakyat mendukung sepenuhnya program-program mereka. Para pemilik modal berlomba-lomba menanam saham di perusahaan-perusahaan penerbitan pers yang dinilai mampu memberikan laba maksimal. Sementara kelompok kepentingan atau keyakinan tertentu (seperti partai politik, ormas, dan agama) berusaha mendirikan ataupun menguasai penerbitan pers tertentu, agar mereka memiliki sarana untuk mensosialisasikan ideologi atau program kerja mereka.

Masuknya surat kabar kedesa-desanya semakin memudahkan masyarakat untuk memahami arti politik yang sesungguhnya. Sehingga setelah masyarakat mengetahui arti politik itu sendiri, masyarakat dapat berpartisipasi langsung minimal di daerah tempat tinggal masing-masing, seperti ikut serta dalam pemilihan umum, ikut serta sebagai kandidat yang dapat dicalonkan warganya atau turut berperan dalam pemerintahan tingkat desa maupun kecamatan. Arus informasi harus terbuka dan lancar, serta dikelola dengan sikap dan pemahaman yang sama diantara lembaga pemerintah daerah, lembaga pengelola informasi, dan masyarakat. Informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang utama, sebab apalah artinya kehidupan manusia tanpa kebebasan berkomunikasi tanpa kemerdekaan mendapatkan informasi.

Menurut Yusuf, (2010:1) menyatakan bahwa: "Komunikasi ada dimana-mana dirumah, kampus, kantor, dan masjid, bahkan ia sanggup menyentuh segala aspek kehidupan kita, artinya hamper seluruh kegiatan manusia

dimanapun adanya, selalu tersentuh oleh komunikasi”.

Bahkan sejak manusia masih dalam kandungan ibunya sudah mempunyai hak asasi mengakses informasi lewat ibunya. Karena itu informasi dapat dianalogikan sebagai udara, dan karenanya menjadi nafas kehidupan. Artinya tanpa informasi yang cukup sesungguhnya kehidupan kita tidak berarti apa-apa.

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam posisi yang seperti inilah media surat kabar memiliki pengaruh yang sangat besar sebagai media informasi politik bagi masyarakat. Surat kabar sebagai salah satu lembaga pengelola informasi, mempunyai potensi yang besar untuk mendorong tumbuhnya dan semakin majunya pengetahuan masyarakat. Dengan demikian media surat kabar memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap masyarakat sebagai sumber informasi.

PEMBAHASAN

Pengaruh dapat dikatakan sebagai dampak, pengaruh dalam penulisan ini dapat diartikan sebagai adanya suatu hubungan yang sangat signifikan antara sesuatu yang terkait, yang dilakukan atau dapat dikatakan bahwa pengaruh adalah suatu perubahan dalam suatu variabel yang dapat berakibat terhadap variabel lainnya.

Menurut Chilcote, (2003:307) menyatakan bahwa: "Pengaruh merupakan kemampuan untuk membuat pihak-pihak lain bertindak, dan agregasi kepentingan dapat mempengaruhi beberapa tindakan politik, opini publik, juga dapat memberikan pengaruh yang menentukan”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa; Pengaruh adalah daya yang

ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang (Depdiknas Edisi ke Tiga 2003: 849). Selain itu pengaruh juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk membuat pihak-pihak lain bertindak.

Surat kabar sebagai pemberi informasi karena dengan pemberitaan-pemberitaan yang menggambarkan segala sesuatu yang sedang berlangsung disekitarnya ini akan memberikan titik terang kepada para pembaca tentang apa yang terjadi atau peristiwa yang sedang berlangsung disekitarnya.

Surat kabar merupakan sinonim dari Koran, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa surat kabar merupakan lembaran-lembaran kertas yang bertuliskan kabar atau berita yang terbagi-bagi atas kolom-kolom, terbit setiap hari atau secara periodik (Depdiknas Edisi Ke tiga, 2003: 595).

Menurut Abidin, (2006: 32) menyatakan bahwa: “Berita merupakan laporan tentang suatu peristiwa yang telah ataupun sedang terjadi, yang memerhatikan dan mengedepankan sisi kemanusiaan serta menarik perhatian sebagian besar pembaca/ pendengar/ penontonnya”.

Salah satu media yang sifatnya statis dan mengutamakan pesan-pesan visual adalah media cetak. Media cetak terdiri dari dua macam yaitu surat kabar dan majalah. Surat kabar dinilai lebih *up to date* dalam menyajikan berita yang akan disampaikan kepada khalayak jika dibandingkan dengan majalah

Menurut (Agee, 2010, Bentuk-bentuk Media Massa dalam <http://deniborin.blogdetik.com/2010/05/23/fungsi-surat-kabar>) menyatakan bahwa: surat kabar memiliki tiga fungsi utama dan fungsi sekunder. Fungsi utama media adalah : (1) *to inform* (menginformasikan kepada pembaca secara objektif tentang apa yang terjadi dalam suatu komunitas, negara dan dunia, (2) *to comment* (mengomentari berita yang disampaikan dan mengembangkannya ke dalam focus berita, (3) *to provide*

(menyediakan keperluan informasi bagi pembaca yang membutuhkan barang dan jasa melalui pemasangan iklan di media.

Fungsi Sekunder media adalah: (1) untuk mengkampanyekan proyek-proyek yang bersifat kemasyarakatan, yang diperlukan sekali untuk membantu kondisi-kondisi tertentu, (2) memberikan hiburan kepada pembaca dengan sajian cerita komik, kartun dan cerita-cerita khusus, (3) melayani pembaca sebagai konselor yang ramah, menjadi agen informasi dan memperjuangkan hak.

Media secara harfiah dapat diartikan sebagai perantara, penyampai, atau penyalur. Pada zaman lampau atau bahkan pada zaman sekarang dikampung-kampung pelosok tanah air inipun "Media" banyak digunakan orang.

Menurut Wikipedia 2006 dalam Yusuf, (2010: 226) lebih lengkap mendefinisikan media yakni sebagai berikut:

"media (jamak dari medium): bermakna sebagai pembawa pesan atau informasi komunikasi. Selanjutnya ada istilah media massa (mass media), yakni semua informasi yang melibatkan komunikasi massa seperti majalah, sinema, film, surat kabar, radio, televisi, internet, buku, CD/CD-ROM, DVD dan lainnya".

Tampak jelas bahwa beberapa batasan tentang media tersebut menunjukkan bahwa pengertian-pengertian media pada intinya berkisar pada "alat penyalur" atau "pembawa pesan". Dilihat dari fungsinya, media memang berkemampuan untuk menyimpan informasi, artinya saluran pembawa pesan tersebut mampu dimanfaatkan pada saat yang diperlukan, tidak perlu harus langsung sebagaimana orang yang sedang berbicara. Buku, misalnya mampu menyimpan informasi untuk waktu yang sangat lama, bahkan hingga puluhan dan ratusan tahun, juga media yang lainnya seperti rekaman video, film dan media elektronik lainnya.

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata

yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa: Informasi adalah penerangan atau pemberitahuan, kabar atau berita (Depdiknas Edisi Ke Tiga, 2003:432).

Secara umum informasi adalah data yang sudah diolah menjadi suatu bentuk lain yang lebih berguna yaitu pengetahuan atau keterangan yang ditujukan bagi penerima dalam pengambilan keputusan, baik masa sekarang atau yang akan datang.

Menurut Terry, 2010, Definisi informasi dalam (<http://definisi-pengertian.blogspot.com/2011/01/pengertian-informasi.html>). menjelaskan, berguna atau tidaknya informasi tergantung pada beberapa aspek, yaitu: Apabila informasi itu tujuannya untuk memberikan bantuan maka informasi itu harus membantu si penerima dalam usahanya untuk mendapatkannya; Penyampaian dan mengolah data, inti dan pentingnya info harus dipertahankan; Informasi yang disajikan harus sesuai dengan perkembangan informasi itu sendiri; Informasi yang didapat harus tersedia dalam ruangan atau tempat yang tepat agar penggunaannya lebih terarah bagi si pemakai; Dalam hubungannya bentuk informasi harus disadari oleh penggunaannya secara efektif, hubungan-hubungan yang diperlukan, kecenderungan-kecenderungan dan bidang-bidang yang memerlukan perhatian manajemen serta menekankan informasi tersebut ke situasi-situasi yang ada hubungannya; Agar informasi efektif informasi harus ada hubungannya antara kata-kata dan arti yang cukup jelas dan menghindari kemungkinan salah tafsir".

Jelaslah bahwa agar informasi itu menjadi berguna harus disampaikan kepada orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dalam bentuk yang tepat pula.

Informasi yang relevan adalah informasi yang ada hubungannya atau kepentingannya bagi si penerima, sedangkan informasi yang

tidak ada atau sedikit sekali kepentingan bagi si penerima.

Menurut (Widjaja, 2008:41) menyatakan bahwa:

”Manfaat atau faedah dari informasi adalah: 1) Setiap orang saat akan mengambil keputusan untuk mengambil keputusan yang tepat memerlukan informasi yang relevan, berguna, tepat dan benar. Dengan demikian informasi merupakan bahan baku untuk mengambil keputusan. Pengambilan keputusan oleh seseorang tanpa informasi yang relevan, berguna, tepat dan benar berarti seseorang mempertaruhkan daya yang dipercayakan kepadanya, karena tindakannya secara tidak langsung bersifat untung-untungan yang suksesnya kecil. 2) Tingkat hubungan dalam penyampaian informasi, informasi dapat disebut pesan, pesan terjadi karena ada penyampaian pesan dan penerima pesan. Terjadi informasi membuat terjalinnya hubungan antara penyampai pesan dan penerima pesan”.

Penggunaan konsep “politik” dalam pergaulan sehari-hari sering kali berkonotasi negatif dan terkesan menakutkan. Seringkali orang menggambarkan bahwa politik itu merupakan huru-hara dipertanian, demonstrasi mahasiswa, atau konflik-konflik di dalam partai politik. Dengan demikian, dapat kita bayangkan betapa rancunya penggunaan istilah “politik” dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam hal ini istilah “politik” diartikan dalam konsep akademik.

Politik berasal dari kata “*Polis*” yang berarti Negara kota yang bersifat totalitas, yaitu kesatuan antara Negara (kota) dengan masyarakat. Menurut *Harold Lasswell* dalam dasar-dasar ilmu politik menyatakan bahwa politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana (*who gets what, when, and how*). Menurut Miriam Budiardjo dalam Halking, (2007: 10) menyatakan bahwa politik adalah “bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan Negara dari sistem

itu dan melaksanakan tujuan itu”. Selain itu. Menurut Ramlan Surbakti dalam Halking, (2007:15) menyatakan bahwa politik adalah “interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu”.

Jadi jelaslah menurut pendapat para ahli bawa politik sebenarnya bukanlah suatu konsep yang berkonotasikan negatif ataupun menakutkan, dengan kata lain bahwa politik merupakan adanya suatu interaksi ataupun hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, ataupun masyarakat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat bagi seluruh masyarakat demi kebaikan bersama dan tujuan bersama.

Menurut Maran (2001: 147) menyatakan bahwa: partisipasi politik merupakan usaha terorganisir oleh warga Negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum”. Usaha ini dilakukan berdasarkan kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu Negara.

Menurut (Budiardjo, 2008:367) menyatakan bahwa:

“Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*Publik Policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial, dan lain sebagainya. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang atau ikut serta aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan Negara atau upaya-upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah”.

Menurut Myron Weiner dalam sosiologi dan politik, (2004: 69) menyatakan bahwa: ada lima penyebab timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik, antara lain sebagai berikut: 1) Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat semakin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik. 2) Perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik. 3) Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang. 4) Konflik antar kelompok pemimpin politik. Jika timbul konflik antar elite, maka yang dicari adalah dukungan rakyat. Terjadi perjuangan kelas menentang kaum eristokrat yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat. 5) Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

Kegiatan yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan perbedaan partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Menurut pengamatan, jumlah orang yang mengikuti kegiatan yang tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri, seperti memberikan suara dalam pemilu, besar sekali. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivitas politik ini hanya mencakup

antara lain menjadi pemimpin partai politik atau kelompok kepentingan (Syarbaini, 2004:69).

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa Partisipasi warga masyarakat, merupakan suatu tindakan yang dilakukan demi mencapai kepentingan umum, yang berdasarkan pada nilai-nilai yang legal. Dalam hal ini partisipasi politik lebih menekankan pada beberapa hal yaitu: 1) Sikap warga masyarakat terhadap pemimpin, 2) Kerjasama antara anggota masyarakat dengan pemimpin dalam mempengaruhi keputusan politik. 2) Perilaku warga masyarakat dalam kegiatan politik harus didorong oleh nilai-nilai ideal. 3) Keikutsertaan warga masyarakat memberikan hal suara dalam pemilihan sukarela.

Melalui isu-isu kebijakan pemerintah nantinya dapat memunculkan suatu opini publik yang dapat mempengaruhi kebijakan publik, menurut Helena olli, 2007:33 menyatakan bahwa opini adalah "suatu pernyataan tentang sikap mengenai suatu masalah yang bersifat kontroversial. Opini timbul sebagai hasil pembicaraan tentang masalah yang kontroversial yang menimbulkan pendapat berbeda-beda".

Untuk memodernisasi masyarakat yang sedang berkembang seperti Indonesia sendiri (terutama daerah-daerah terpencil) tidak mungkin apabila saran modernisasi menjauhi tradisi, akibatnya modernisasi lebih sukar untuk diwujudkan. Kecakapan seorang komunikator terletak pada mengidentifikasi kemungkinan penolakan yang disebabkan sikap yang dialaminya. Setelah menyelidiki dan mengetahui sikap kelompok, menggunakan sikap yang akan merupakan dukungan bagi opini baru. Dengan demikian seorang komunikator akan bertindak sesuai teknik persuasif. Namun yang lebih penting dengan menggunakan sikap yang ada dan yang dimiliki sebagai tradisi suatu masyarakat, akan menyumbangkan dan dan mewujudkan suatu pembaruan, dengan

penyebaran opini dengan jalan harmonis dan demokratis. Keuntungan lain penyebaran suatu opini yang terjadi dengan proses menggunakan sikap masyarakat yang bersangkutan akan menghasilkan partisipasi pada pihak yang diajak sehingga tujuan tercapai.

Dalam pembentukan suatu opini baru mengenai persoalan, yang diawali dengan diskusi. Kemungkinan untuk mencapai opini yang benar ataupun yang baik untuk pemecahan persoalan, tergantung sekali dari: 1) Apakah minoritas dapat juga berbicara lain pada mayoritas, 2) Informasi yang cukup dan benar dapat dipakai sebagai landasan ataupun titik tolak pembentukan pendapat, 3) Sifat manusia untuk berpihak.

Perlu suatu pendekatan baru untuk mengembangkan partisipasi rakyat dalam kehidupan Negara dan pembangunan. Kita perlu mengembangkan pemikiran prinsipal bahwa baru yang melandasi pembangunan yaitu bahwa "partisipasi memperlancar pembangunan dan pembangunan menambah partisipasi" (sebelumnya adalah stabilitas memperlancar pembangunan dan pembangunan memperkuat stabilitas"). Apapun nama pendekatan baru itu dua hal yang perlu untuk membawa kebaruan itu, yaitu: pertama, pemerintahan yang efektif dan efisien dalam arti yang benar. Efektif jelas berarti mampu menyelesaikan program-programnya. Efisien dalam arti politik adalah dengan sedikit mungkin menggunakan kekuasaan politik pemerintah dapat melaksanakan program-program secara optimal. Karena dalam politik yang menjadi alat tukar adalah kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mendapatkan dukungan dengan penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik (seperti penangkapan, ancaman senjata), yang ditukar dengan dukungan orang atau kelompok orang. Pemerintah yang efisien adalah yang dapat memperoleh dukungan masyarakat tanpa banyak menggunakan kekuasaannya. Hal itu bisa kalau rakyat memang mempercayai

pemerintahannya. Untuk dapat dipercaya pemerintah harus dapat member rasa aman, kepastian dan keadilan hukum dan kesejahteraan yang lebih merata. Kedua, pemerintah yang lebih mempercayai rakyatnya sendiri dengan lebih banyak memberi kekuasaan yang lebih besar untuk berorganisasi, mengeluarkan pendapat secara lisan atau tertulis, memilih sendiri dalam pemilihan umum tanpa paksaan atau ancaman.

Dengan pendekatan yang baru ini prinsip-prinsipnya saja dikemukakan diatas kita dapat menghindari tumbuhnya konservatisme di bidang politik. Dalam keadaan pertumbuhan ekonomi yang baik seharusnya pemerintah Negara berkembang juga dapat secara bertahap memperluas partisipasi politik rakyat. Dengan demikian kita dapat menghindari terjadinya krisis politik.

Menurut Koentjaraningrat (2000: 144), menyatakan bahwa: "Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, atau dengan istilah ilmiah, saling berinteraksi. suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui apa warganya dapat saling berinteraksi".

Masyarakat merupakan salah satu satuan sosial, atau kesatuan hidup manusia, istilah inggrisnya adalah *society*, sedangkan masyarakat itu sendiri berasal dari bahasa Arab *syakara* yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Kata Arab masyarakat berarti saling bergaul yang istilah ilmiahnya berinteraksi.

Masyarakat tidak begitu saja muncul seperti sekarang ini tetapi adanya perkembangan yang di mulai dari masa lampau sampai saat sekarang ini dan terdapat masyarakat yang mewakili masa tersebut, masyarakat ini kemudian berkembang mengikuti perkembangan zaman sehingga kemajuan yang dimiliki masyarakat sejalan dengan perubahan yang terjadi secara global, tetapi ada pula masyarakat yang berkembang tidak seperti mengikuti perubahan zaman

melainkan berubah sesuai dengan konsep mereka tentang perubahan itu sendiri.

Menurut Budiardjo, (2008: 46) menyatakan bahwa masyarakat adalah:

“masyarakat adalah suatu sistem hubungan yang di tata. Anggota-anggota masyarakat menghuni suatu wilayah geografis yang mempunyai kebudayaan-kebudayaan dan lembaga-lembaga yang sama. Masyarakat dapat menunjuk pada masyarakat kecil, misalnya kelompok etnis batak di Sumatera Utara, atau suatu masyarakat yang lebih luas *nation state* seperti masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat seperti ini anggota masyarakat dapat berinteraksi satu sama lain karena faktor budaya, faktor agama, dan faktor etnis.

Kemudian perkataan *Society* dalam arti umum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan masyarakat, berarti suatu badan atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai anggota masyarakat; anggota-anggota masyarakat yang bersama biasanya dianggap sebagai suatu golongan, terbagi-bagi dalam berbagai kelas menurut kedudukan dalam masyarakat itu. Dalam arti khusus *Society* berarti hubungan-hubungan sosial, tingkah laku atau cara hidup godaan manusia didalam masyarakat dari kalangan tinggi, kaum elite dan sebagainya, yang biasanya menduduki kelas tinggi dalam masyarakat.

Pada masa sekarang ini, komunikasi massa memberikan informasi, gagasan dan sikap pada khalayak yang beragam dan besar jumlahnya dengan menggunakan media. Hal ini yang mempengaruhi perkembangan media massa yang menguntungkan. Salah satu media yang paling besar digemari adalah Surat Kabar karena mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Yaitu dapat dibaca berulang kali dan menjangkau khalayak luas karena harganya yang relatif murah. Untuk memberikan pelayanan informasi pada masyarakat, pers diharapkan mampu mencerdaskan masyarakat melalui muatan informasi yang memiliki kebenaran, kepentingan, dan manfaat untuk masyarakat. Surat kabar merupakan salah satu bentuk dari media massa yang merupakan alat

atau media penyampaian informasi kepada khalayak masyarakat, Media massa memang merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, bahkan mungkin media massa juga menempati urutan ke dua setelah kebutuhan sembako. Pada masa orde baru kebebasan sebuah media massa sangat dikekang atau bahkan cenderung dikebiri oleh negara dan hal ini sangat berbeda dengan keberadaan media massa disaat ini. saat ini media massa dengan bebas mempublikasikan segala informasi tanpa ditutupi sedikit pun sehingga semua permasalahan yang ada di negeri ini dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Surat kabar sebagai pemberi informasi karena dengan pemberitaan- pemberitaan yang menggambarkan segala sesuatu yang sedang berlangsung disekitar masyarakat, akan memberikan titik terang kepada para pembacanya tentang apa yang terjadi atau peristiwa yang sedang berlangsung disekitar. Surat kabar termasuk pengertian pers dalam arti sempit. Surat kabar dalam hal ini merupakan salah satu media komunikasi politik. Pers atau media amat dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun rakyat dalam berkehidupan bernegara. Pemerintah mengharapkan dukungan dan ketaatan masyarakat untuk menjalankan program kebijakan Negara, sedangkan masyarakat juga ingin mengetahui program dan kebijakan pemerintah yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan.

Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Pasal 1 menyatakan bahwa: “Pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data-data grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan saluran yang tersedia”.

Dan dalam Pasal 3 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang pers disebutkan mengenai fungsi pers, dalam hal ini pers

Nasional. Adapun fungsi pers nasional adalah sebagai berikut:

Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.

Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Surat kabar yang masuk kedesa-desanya, khususnya Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, seperti surat kabar, Asahan pos, Waspada, Sinar Indonesia Baru, Analisa, Kompas dan sebagainya senantiasa menyajikan berita-berita yang teraktual baik itu berita Kriminal, hukum, politik, dan berita lainnya senantiasa dapat memberikan pendidikan dan pengetahuan bagi setiap pembacanya, setelah masyarakat membaca surat kabar maka masyarakat dapat lebih memahami arti politik itu sendiri karena pada umumnya surat kabar banyak memberikan informasi politik kepada masyarakat. Sehingga dengan pemahaman masyarakat akan arti politik masyarakat dapat berpartisipasi dalam dunia perpolitikan seperti, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat mengenai pembangunan desa, menjadi anggota salah satu partai, aktif dalam memajukan sarana dan prasarana salah satu partai, aktif dalam kegiatan politik, gotong royong dan sebagainya.

Melalui media massa, khususnya surat kabar ini dapat mempengaruhi masyarakat untuk senantiasa berpartisipasi. Negara Indonesia adalah Negara Demokrasi, Demokrasi dalam bidang politik, menekankan pentingnya partisipasi Warga Nagara dalam kehidupan politik, mengingat demokrasi menempatkan kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat, dan menjadi salah satu hak dasar yang harus dijamin adalah menyampaikan pikiran baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan (Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia).

Media massa emberikan pengaruh kepada masyarakat untuk senantiasa berpartisipasi, karena dengan membaca surat

kabar, maka akan semakin meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat disegala bidang terutama bidang politik, dengan membaca surat kabar masyarakat menjadi lebih paham mengenai konsep politik itu sendiri, menjadikan masyarakat untuk berpikiran lebih maju, dan menambah pengetahuan masyarakat mengenai perpolitikan, pemahaman masyarakat akan politik ini dapat di aplikasikan dalam wujud partisipasi, partisipasi dalam bentuk apa saja baik itu pemilihan umum, gotong royong, ikut serta memajukan salah satu partai politik, ikut serta dalam rapat mengenai pembangunan desa, aktif dalam organisasi politik, partisipasi dalam diskusi politik informal, dan lain sebagainya. Hal inilah yang sangat diharapkan pemerintah, yakni masyarakat dengan sukarela untuk berpartisipasi, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun, pemerintah tidak menginginkan adanya sikap apatisisme politik, yakni sikap yang dimiliki orang yang tidak berminat atau tidak punya perhatian terhadap orang lain, situasi, atau gejala-gejala umum atau khusus yang ada dalam masyarakatnya. Orang yang apatis adalah orang yang pasif, yang mengandalkan perasaan dalam menghadapi permasalahan. Ia tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya baik pribadi maupun sebagai warga masyarakat. Partisipasi dalam negara demokrasi menjadikan masyarakat sebebaskan untuk memilih dan diharapkan masyarakat juga nantinya lebih jeli untuk memilih calon-calon pemimpin dimasa yang akan datang. Calon-calon pemimpin yang benar-benar dapat memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju yang dapat bersaing dengan dunia internasional.

Data ini juga didukung dari hasil wawancara dan dapat diketahui bahwa surat kabar atau media cetak memiliki andil dalam pembentukan persepsi masyarakat. Persepsi merupakan sebuah proses pemberian makna terhadap apa yang kita tangkap dari indera kita, sehingga kita memperoleh pengetahuan baru dari hal tersebut. Persepsi sangat

dipengaruhi oleh informasi yang ditangkap secara keseluruhan. Begitu juga dengan pencitraan pada dasarnya juga dipengaruhi oleh informasi yang diterima dan dipersepsi. Informasi atau berita dalam media massa merupakan hasil seleksi yang dilakukan oleh gatekeeper yang dijabat oleh pemimpin redaksi atau redaktur pelaksana surat kabar. Berita dalam surat kabar sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah laporan dari suatu kejadian penting dan dianggap menarik perhatian umum. Berita merupakan salah satu informasi yang diberikan oleh surat kabar. Dalam hal penyajian berita harus melalui seleksi. Karena isi berita sangat berpengaruh pada minat masyarakat untuk membaca.

Oleh karena adanya seleksi dalam pemuatan berita, maka tidak semua berita atau informasi yang ada dapat ter-expose. Berita yang dimuat biasanya hanya berita yang memiliki nilai jual. Terkadang dari sinilah kurang netralnya sebuah media. Media hanya mementingkan keuntungan saja, terkadang media kurang memperhatikan masyarakat kecil khususnya. Sehingga mereka tak pernah terjamah oleh dunia elit. Akan tetapi surat kabar ini dinilai lebih efektif bagi khalayak dibanding televisi. Sajian berita surat kabar selain bentuk kata tercetak, juga kerap dalam bentuk visual berupa foto berita, lambang partai politik, atau karikatur. Dari asumsi ini terlihat bahwa surat kabar memiliki pengaruh yang besar pula dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Suatu pesan atau berita yang sering diulang-ulang akan dapat menarik perhatian seseorang dibanding dengan pesan yang kurang banyak diungkapkan. Terlebih jika suatu berita serentak di berbagai surat kabar maupun televisi ditayangkan.

Dalam surat kabar, sebuah berita besar atau yang menjadi topik utama selalu ditempatkan di halaman depan dengan judul yang menarik dan membuat penasaran ditambah dengan foto yang mendukung. Semakin sering seorang tokoh atau berita tentang partai dimuat di halaman itu, maka

akan semakin terkenal dia. Opini publik sangat mudah dipengaruhi oleh iklan maupun pemberitaan yang ada di berbagai media. Semakin rutin masyarakat untuk membaca surat kabar maka pola pemikirannyapun akan semakin berkembang, salah satunya semakin meningkatnya partisipasi dalam dunia perpolitikan, masyarakat menjadi semakin cerdas dalam menanggapi berbagai pemberitaan-pemberitaan atau isu-isu publik yang ada di media, dengan berlangganan surat kabar diharapkan mampu mengemansipasi kesadaran masyarakat dan tatanan sosial agar berperan sebagai instrumen kebebasan berekspresi dan berpendapat. Tujuannya tentunya agar fungsi-fungsi kontrol negara ataupun pemerintah terhadap kebebasan bersuara bagi masyarakatnya menjadi lebih berkurang dan menjauhi dari segala bentuk represi atau penekanan dan penindasan. Segala bentuk sensor terutama dalam hal komunikasi politik idealnya menjadi semakin menghilang.

Mengingat bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, media massa selama ini dimaknai sebagai salah satu pilar demokrasi. Artinya, media memiliki peranan yang penting di dalam menjaga bahkan mempengaruhi jalannya suatu sistem politik yang demokratis di suatu negara atau wilayah tertentu. Sedikit banyaknya praktek media massa berkontribusi terhadap bagaimana prinsip-prinsip demokratisasi mampu terselenggarakan dalam tatanan masyarakat.

Di negara-negara yang sudah lebih maju dan dianggap telah lebih matang dalam hal pelaksanaan sistem politiknya, maka posisi media sebagai instrumen demokrasi akan lebih terlihat. Media massa menjadi indikator dalam pelaksanaan sistem politik. Selanjutnya mereka akan memposisikan dirinya sebagai penyeimbang dalam perjalanan sistem tersebut dalam upaya menjaga demokratisasi yang berjalan.

Keberadaan media massa untuk itu tidak akan dapat melepaskan diri dari corak sistem politik yang melingkupinya. Sistem politik

yang demokratis tentunya memungkinkan praktek media yang lebih bebas. Di lain pihak jika sistem politiknya dikatakan belum demokratis maka kita akan menemukan praktek-praktek sensor terhadap media. Atau bahkan dalam tahapan yang ekstrim, media hanya digunakan sebagai alat propaganda penguasa atau pemerintah.

Dalam kasus Indonesia perbedaan ini sangat signifikan. Jika dalam fase pemerintahan orde baru di bawah rezim Soeharto yang otoriter maka dapat dikatakan bahwa media massa sama sekali tidak mencerminkan demokrasi. Buktinya adalah adanya kontrol yang ketat dari pemerintah terhadap praktek media massa waktu itu. Bukan hanya soal isi media yang dikontrol tapi juga jumlah media massa yang diijinkan untuk mempublikasikan isinya sangat dibatasi.

Situasi ini berubah drastis ketika sistem politik di Indonesia juga berubah seiring dengan jatuhnya pemerintahan orde baru. Pergantian sistem politik dari yang tadinya cenderung otoriter menjadi lebih bebas menghasilkan sistem pers yang juga lebih bebas. Pemberitaan di media massa mulai menemukan kebebasan dalam menyampaikan fakta yang ada di dalam masyarakat. Pembredelan dan pencabutan izin terbit bagi media massa juga kemudian ditiadakan, terbukti dengan adanya undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 yang antara lain mengatur asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers, sebagaimana yang termaktub dalam bab II pasal 2, 3, 4, 5, dan 6.

Dalam era reformasi media massa lebih dianggap mampu merefleksikan dinamika politik di Indonesia. Media massa mampu menyebarluaskan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat tanpa ada sensor yang berarti sebagaimana yang terjadi pada era orde baru. Berbagai peristiwa politik saat ini tidak dapat lagi dikontrol dan dikendalikan oleh sekelompok elit di Jakarta. Media massa yang bebas, beragam, dan banyak jumlahnya menjadikan penyebaran informasi tentang peristiwa politik menjadi semakin leluasa.

Untuk itu, masyarakat memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses terhadap peristiwa-peristiwa tersebut.

Meski kebebasan pers yang diberikan oleh pemerintah begitu luas berkat reformasi, ternyata belum bisa melahirkan *civil society* yang dicita-citakan. Pers dianggap sebagai penyebar sensasi, pengobar kontroversi sehingga tidak kondusif untuk menunjang proses transisi demokrasi. Sangat sulit untuk menuntut pers bisa bertanggung jawab jika masyarakat tidak memiliki tanggung jawab. Dengan demikian, bisa dilihat bahwa kemerdekaan pers tidak menjamin adanya peningkatan ekonomi, tetapi peningkatan ekonomi bisa menimbulkan aspirasi terhadap perlunya kebebasan pers. Sebuah kebebasan yang ideal untuk pers pada hakikatnya bertumpu pada empat hal, yakni: (1) bekerja untuk menegakkan kebenaran; (2) mempertahankan tanggung jawab sosial; (3) mendidik secara politis dan cultural masyarakat; (4) melayani bangsa dengan jalan mendorong terjadinya perubahan yang menguntungkan.

Meski cukup banyak kekurangan yang ditemui dalam pelaksanaan kebebasan pers di Indonesia sejak reformasi demokrasi digulirkan, baik itu kebablasan sebagaimana dituduhkan oleh berbagai pihak maupun tingginya angka-angka pelanggaran terhadap rambu-rambu *privacy* seseorang, hasil laporan *reporter sans frontiers (rsf)*, sebuah organisasi pemerhati pers internasional dalam rilisnya yang dikeluarkan pada tahun 2005 (dalam Cangara 2009: 110), menempatkan kebebasan pers Indonesia pada peringkat ke-57 dari 139 negara, padahal pada tahun 2003 indeks kebebasan pers Indonesia masih berada pada peringkat ke-111 dari 166 negara. Amerika Serikat sendiri ternyata masih berada pada peringkat ke-17.

Dalam hal ini bentuk dari perwujudan demokrasi antara lain adalah partisipasi, partisipasi politik amat urgen dalam kontes dinamika perpolitikan di suatu masyarakat. Sebab dengan partisipasi politik dari setiap

individu maupun kelompok masyarakat maka niscaya terwujud segala yang menyangkut kebutuhan warga masyarakat secara universal. Sehingga demikian, keikutsertaan individu dalam masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan kepentingan umum. Dan paling ditekankan dalam hal ini terutama sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan politik yang ada. Dalam artian setiap individu harus menyadari peranan mereka dalam mendirikan kontribusi sebagai insan politik. Dalam hal ini peranan meliputi pemberian suara, kegiatan menghadiri kampanye serta aksi demonstrasi. Namun kegiatan-kegiatan tersebut sudah barang tentu harus dibarengi rasa sukarela sebagai kehendak spontanitas individu maupun kelompok masyarakat dalam partisipasi politik. Dengan kegiatan-kegiatan politik ini pula, intensitas daripada tingkat partisipasi politik warga masyarakat dapat termanifestasi. Oleh karena itu, sikap dan perilaku warga masyarakat dalam kegiatan politik berupa pemberian suara dan kegiatan kampanye dalam pemilihan kepala daerah merupakan parameter dalam mengetahui tingkat kesadaran partisipasi politik warga masyarakat.

Paling tidak warga masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik sekaligus mengambil bagian untuk mempengaruhi pemerintah dalam keputusan politik.

SIMPULAN

Dalam mewujudkan proses politik tentunya adanya rasa politik individu dan kelompok masyarakat dalam berbagai kegiatan politik. Kesadaran politik ini sudah barang tentu ditopang dengan pemahaman yang tinggi melalui sosialisasi kepada individu dan kelompok masyarakat sehingga dengan demikian timbulnya orientasi psikologi politik yang ideal, dimana anggota masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik. Oleh karena itu, kesadaran dan pemahaman politik merupakan penunjang

dalam mewujudkan stabilitas politik masyarakat dengan kesadaran dan pemahaman politik pula setiap sikap dan perilaku masyarakat secara partisipasi dapat terwujud sebagaimana mestinya. Salah satu media yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat antara lain adanya surat kabar yang dapat dibaca berulang-ulang dimana saja dan kapan saja. Dengan berlangganan surat kabar dan membaca surat kabar khususnya berita-berita mengenai bidang politik, kesadaran masyarakat akan arti pentingnya partisipasi dapat kian terwujud, masyarakat yang cerdas pasti senantiasa ikut andil dan aktif dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Dan semakin banyak masyarakat yang berlangganan surat kabar maka pengetahuan masyarakat akan semakin meluas dalam segala hal dan menjadikan masyarakat semakin tanggap mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di Negara ini. Meskipun pada dasarnya membuat seseorang untuk berpartisipasi itu tidaklah mudah, ada saja masyarakat yang enggan untuk berpartisipasi, padahal keikutsertaan masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah berdampak bagi masyarakat itu sendiri, apabila masyarakat menentukan kebijakan yang positif, yang didukung oleh pelaksanaan dan pengawasan yang baik, maka yang dihasilkan pun akan menjadi baik. Namun apabila masyarakat atau warga Negara memilih seorang pemimpin yang salah dalam artian pemimpin yang tidak jujur, maka yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri, jadi, pilihan itu sebenarnya ada ditangan masyarakat kita sendiri, jika memilih yang baik, maka hasilnya pun akan baik mengingat Indonesia adalah Negara Demokrasi yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Surat kabar sebagai media penyampaian informasi politik memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agee, 2010. Bentuk-bentuk media massa. <http://deniborin.blogdetik.com/2010/05/23/fungsi-surat-kabar>, Jum'at, 18 Februari 2011.
- Alwi, H. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2003. Depdiknas Edisi Ke Tiga, Jakarta: Balai Pustaka.
- Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Jakarta: Rineka Cipta.
- Batubara, B.M., (2013). Hubungan Komunikasi Badan Perwakilan Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 1 (1): 76-87.
- Budiardjo, M. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Canggara, H. 2009. Komunikasi Politik Konsep, Teori dan Strategi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chilcote N.R.. 2003. Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Paradigma. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Halking, 2007. Dasar-dasar Ilmu Politik. Medan: FIS UNIMED.
- Hidayat, T.W.H., (2015), Analisis Berita Kesehatan di Media Massa terhadap Pelayanan Publik, *Jurnal Simbolika*, 1 (2): 142-157
- Husin, S., Halking. Buku Pedoman Penulisan Skripsi. 2000. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Medan.
- Kadir, A., (2013). Peranan Partai Politik dalam Menanggulangi Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Legislatif 2009, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 1 (1): 65-75.
- Koentjaraningrat. 2000. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusmanto, H, (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 2 (1): 78-90
- Maran, R.R. 2001. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nimmo, D. 2001. Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Olli, H. 2007. Opini Publik. Jakarta: Indeks.
- Prajarto, N. 2004. Komunikasi, Negara dan Masyarakat. Yogyakarta: Fisifol UGM.
- Rivers, L.W., Jensen W. Jay, Peterson, Theodore. 2003. Media Massa dan Masyarakat Modern. Jakarta: Prenada.
- Rush, M. 2000. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Santoso, D.H., (2015), Media dan Politik: Pertarungan Ruang & Kuasa Media Menjelang Pemilihan Presiden, *Jurnal Simbolika*, 1 (1): 1-5
- Setiawan, D. 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan. Medan: FIS UNIMED.
- Sugiyono. 2009. Statistika Untuk penelitian, Bandung: Alfabeta
- Suharyanto, A., (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 2 (2): 166-175
- Susi S dan Adelita L., (2015). Partisipasi Politik Perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 3 (1): 1-3.